

**SINERGITAS *PENTAHHELIX* SEBAGAI STRATEGI  
PENEGAKAN HUKUM MENGENAI LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009**

Oleh

**Amelia Putri, NIM 2014101035**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk: (1) memahami, mengkaji dan mengevaluasi perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; dan (2) penerapan konsep *Pentahelix* sebagai taktik dalam penegakan hukum terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Metodologi penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi kajian terhadap sistem peraturan dalam suatu lingkungan hukum tertentu. Sumber primer, sekunder, dan tersier disertakan dalam dokumen hukum yang digunakan. Tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan data hukum, dan analisis deskriptif digunakan untuk memberikan rincian yang mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tidak mengatur secara tegas perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah non-pertanian yang digolongkan ATR/BPN sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; Namun masyarakat berhak melaporkan kinerja pejabat ATR/BPN. BPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 67 Huruf (d), dan (2) Pendekatan *Pentahelix* yang melibatkan lima aktor utama, yaitu pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha sebagai fasilitator, akademisi sebagai konseptor, masyarakat sebagai akselerator, dan media sebagai pendukung publikasi, dapat menjadi strategi dalam menegakkan hukum terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kelima elemen tersebut bekerja bersinergi dengan peran masing-masing dalam mendukung penerapan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kata Kunci: LP2B, Sinergitas *Pentahelix*, Penegakan Hukum.

**PENTAHELIX SYNERGY AS A STRATEGY ENFORCEMENT  
OF LAWS REGARDING SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND IN  
THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 41 OF 2009**

**By**

**Amelia Putri, NIM 2014101035**

**Law Department**

**ABSTRACT**

*The main objectives of this research are to: (1) understand, study and evaluate the legal protection of sustainable food agricultural land (LP2B) in accordance with Law Number 41 of 2009; and (2) application of the Pentahelix concept as a tactic in law enforcement regarding the protection of sustainable food agricultural land. The normative legal research methodology used in this research includes a study of the regulatory system in a particular legal environment. Primary, secondary and tertiary sources are included in the legal documents used. A literature review is used to collect legal data, and descriptive analysis is used to provide in-depth details. Research findings show that (1) Law Number 41 of 2009 does not strictly regulate legal protection for owners of rights to non-agricultural land which is classified by ATR/BPN as sustainable food agricultural land; However, the public has the right to report on the performance of ATR/BPN officials. BPN based on Law Number 41 of 2009 Article 67 Letter (d), and (2) The Pentahelix approach involving five main actors, namely the government as the regulator, businesses as facilitators, academia as conceptualizers, communities as accelerators, and the media as publicity supporters, can be a strategy in enforcing the law related to the protection of sustainable food agriculture land. These five elements work synergistically with their respective roles in supporting the implementation of the law regarding sustainable food agriculture land.*

*Keywords: LP2B, Pentahelix Synergy, Law Enforcement.*